

SKRIPSI

**UNSUR MENS REA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PEJABAT PEMERINTAHAN ATAS KEBIJAKAN
YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

DANDI RAHMADHAN

2210113202

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing :

Prof. Dr. H. Ismansyah, S. H., M. H.

Dr. Lucky Raspati, S. H., M. H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No. Reg : 56/PK-IV/IV/2026

	No. Alumni Universitas	Dandi Rahmadhan	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Batusangkar/ 28 Oktober 2003 b. Nama Orangtua : Yardi c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. No. BP : 2210113202	f. Tanggal Lulus : 26 Agustus 2026 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 tahun i. IPK : 3,62 j. Alamat : Jorong Koto Hilir, Kecamatan Sungai Tarab	

**UNSUR MENS REA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT
PEMERINTAHAN ATAS KEBIJAKAN YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA
KORUPSI**

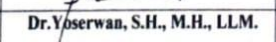
Dandi Rahmadhan, 2210113202, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Khusus Hukum Pidana (PK IV), Halaman Tahun 2026, Pembimbing Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H. dan Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Peningkatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berawal dari pengambilan kebijakan publik menimbulkan persoalan mengenai batas antara kesalahan administratif, kegagalan kebijakan, dan tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya, pembuktian unsur *mens rea* sering kali dikesampingkan karena penegakan hukum lebih menitikberatkan pada adanya kerugian keuangan negara dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana konstruksi unsur *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintahan atas kebijakan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi; dan Kedua, bagaimana penerapan unsur *mens rea* dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Thomas Trikasih Lembong dan Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Ira Puspawati. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur *mens rea* tidak cukup dibuktikan melalui adanya kerugian negara, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran prosedur, tetapi harus didasarkan pada pembuktian kesalahan subjektif berupa kesengajaan, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, konflik kepentingan, dan itikad buruk dalam penggunaan kewenangan. Selain itu, penerapan unsur *mens rea* dalam kedua putusan masih cenderung dibangun melalui pendekatan objektif dengan menitikberatkan pada penyimpangan prosedur, keuntungan pihak lain, dan kerugian negara, sehingga belum sepenuhnya menguraikan keadaan batin terdakwa ketika mengambil kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pembuktian unsur *mens rea* yang lebih komprehensif agar pemberantasan korupsi tetap efektif tanpa menimbulkan kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang diambil secara beritikad baik.

Kata Kunci : Mens Rea, Kebijakan Publik, Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pidana Korupsi.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 26 Agustus 2026 Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Dandi Rahmadhan	Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LLM.	Iwan Kurniawan, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: Riki Afrizal, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Dandi Rahmadhan	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : October /28 th January 2003 b. Parent's Name : Yardi c. Faculty : Law d. Concentration : Criminal Law e. Student ID : 2210113202	f. Graduation Date : 26 th Agustus 2026 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Length of Study : 4 Years i. GPA : 3,62 Address : Jorong Koto Hiling, Kecamatan Sungai Tarab	

MENS REA IN THE CRIMINAL LIABILITY OF GOVERNMENT OFFICIALS FOR POLICIES RESULTING IN CORRUPTION OFFENSES

Dandi Rahmadhani, 2210113202, Faculty of Law, Andalas University, Special Program in Criminal Law (PK IV), Year Page 2026, Supervisor Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H. and Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H.

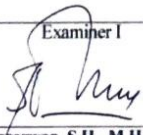
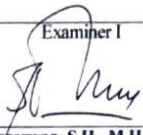
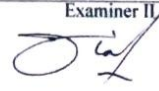
ABSTRACT

The increasing enforcement of anti-corruption laws against public policies has raised legal concerns regarding the distinction between administrative errors, policy failures, and criminal acts of corruption. In practice, the establishment of mens rea is often overlooked, as law enforcement tends to focus primarily on state financial losses and abuse of authority. This study examines two research questions: first, how mens rea is conceptually constructed in the criminal liability of public officials for public policies that result in corruption; and second, how mens rea is applied in judicial reasoning in Decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst concerning Thomas Trikasih Lembong and Decision Number 48/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst concerning Ira Puspawati. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings demonstrate that mens rea cannot be established solely on the basis of state financial losses, abuse of authority, or procedural violations, but must be supported by proof of subjective culpability, including intent, the purpose of unlawfully benefiting oneself or another person, conflicts of interest, and bad faith in exercising public authority. Furthermore, the application of mens rea in both judicial decisions predominantly relies on an objective inference approach, emphasizing procedural irregularities, benefits conferred upon third parties, and state financial losses, without adequately examining the defendants' state of mind when making policy decisions. Therefore, a more comprehensive approach to proving mens rea is necessary to ensure effective anti-corruption law enforcement while preventing the criminalization of public policies adopted in good faith.

Keywords: Mens Rea, Criminal Liability, Public Policy, Abuse of Authority, Corruption.

This minor thesis has defended in front of the examiner team at, April 21th 2026.

Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Dandi Rahmadhan	Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.	Iwan Kurniawan, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Criminal Law: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**

Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer
No. Alumni Faculty	Name: Signature:
No. Alumni University	Name: Signature: